

ANALISIS FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PROGRAM KERJA DINAS PU BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024 BERDASARKAN *LOGICAL FRAMEWORK APPROACH*

Gafi Febrians¹, M. Zimamul Khaq²

UIN Sunan Ampel Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2025

Revised Desember 2025

Accepted Desember 2025

Available online Desember 2025

Email:

gafifebrians888@gmail.com¹,

zimamulkhaq@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi faktor penghambat pelaksanaan Program Kerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dan (2) menganalisisnya menggunakan pendekatan *Logical Framework Approach*. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, terkait faktor penghambat, ditemukan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan riil dan ketersediaan pagu anggaran, serta hambatan transformasi digital dan inefisiensi administratif. Kedua, berdasarkan analisis LFA, faktor-faktor tersebut menyebabkan disrupsi logika vertikal akibat kegagalan asumsi (*assumption failure*). Kegagalan teridentifikasi pada rantai *Input* menuju Aktivitas (kapasitas fiskal tidak mampu mengimbangi risiko kendaraan ODOL) dan rantai Aktivitas menuju *Output* (disintegrasi sistem informasi memicu bottleneck administratif dan risiko SILPA). Penelitian menyimpulkan bahwa tidak tercapainya target kinerja bukan disebabkan oleh kelemahan teknis engineering, melainkan kegagalan perencanaan dalam memitigasi risiko eksternal.

Kata Kunci: Evaluasi Program, *Logical Framework Approach*, Dinas PU Bina Marga, Anggaran Infrastruktur, Transformasi Digital.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author.

Abstract

This study aims to (1) identify the inhibiting factors in the implementation of the 2024 Work Program of the East Java Provincial Public Works (PU) Bina Marga Office and (2) analyze them using the Logical Framework Approach (LFA). The research employs a qualitative descriptive method. The results reveal two main findings. First, regarding inhibiting factors, the study identified an imbalance between real needs and budget availability, as well as obstacles in digital transformation and administrative inefficiencies. Second, based on the LFA analysis, these factors caused a disruption of vertical logic due to assumption failure. Failures were identified in the Input-to-Activity chain (fiscal capacity failed to offset risks from Over Dimension Over Load/ODOL vehicles) and the Activity-to-Output chain (information system disintegration triggered administrative bottlenecks and SILPA risks). The study concludes that the failure to achieve performance targets was not due to technical engineering deficiencies, but rather due to planning failures in mitigating external risks.

Keywords: Program Evaluation, Logical Framework Approach, Public Works Department, Infrastructure Budgeting, Digital Transformation.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan selalu menjadi fondasi penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Di Provinsi Jawa Timur, tanggung jawab besar ini berada di tangan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga, yang setiap tahunnya menyusun rencana kerja untuk memastikan keberlanjutan pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur. Melalui dokumen perencanaan seperti Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), arah kebijakan ditetapkan secara sistematis untuk menjamin kesinambungan pembangunan. (*Dinas Pekerjaan Umum*

Bina Marga Provinsi Jawa Timur, 2021) Namun, ketika memasuki Tahun Anggaran 2024, praktik di lapangan memperlihatkan adanya jarak yang cukup lebar antara target yang tertulis dalam dokumen dengan kondisi nyata yang dihadapi dinas. (*Salim & Faoziyah, 2022*)

Salah satu persoalan yang paling menonjol adalah keterbatasan anggaran. Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD (P-APBD) 2024 mencatat bahwa alokasi untuk sektor pekerjaan umum, termasuk Bina Marga, berada di kisaran Rp 1,243 triliun. (*Pj Gubernur Jatim Sampaikan Nota Keuangan Perubahan KUA PPAS APBD 2024, n.d.*) Angka tersebut memang terlihat besar, tetapi kebutuhan di lapangan jauh lebih kompleks. DPU Bina Marga bahkan mengajukan tambahan sekitar Rp 103 miliar hanya untuk pemeliharaan rutin. Permintaan ini muncul karena sekitar 400 km atau 35 persen dari total panjang jalan provinsi (1.421 km) telah melewati umur teknis rencana jalan, yakni lebih dari sepuluh tahun. (*Pj Gubernur Jatim Sampaikan Nota Keuangan Perubahan KUA PPAS APBD 2024, n.d.*) Kondisi ini membuat banyak ruas jalan membutuhkan penanganan segera, sementara pagu anggaran awal tidak mampu menutup seluruh kebutuhan tersebut. Situasi ini memperlihatkan bagaimana perencanaan yang tertulis sering kali tidak sejalan dengan kapasitas fiskal yang tersedia. (*Jadidoleslami & Azizi, 2022*) Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur memang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi manfaatnya sangat bergantung pada kecukupan pendanaan dan efisiensi pelaksanaan. (*Ma'rifah, 2022*)

Selain keterbatasan anggaran, tantangan lain datang dari aspek teknis, khususnya dalam penggunaan sistem informasi. Upaya digitalisasi melalui aplikasi seperti SATA (Sistem Administrasi Tata Usaha) dan E-Katalog Versi 6 sebenarnya dimaksudkan untuk mempercepat proses administrasi dan pengadaan. Namun, dalam praktiknya, sistem yang belum stabil justru menimbulkan hambatan baru. Gangguan teknis dan lambatnya verifikasi akun penyedia sering kali membuat proses pengadaan barang dan jasa tertunda, sehingga target kegiatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) tidak dapat berjalan sesuai jadwal. Penelitian Phil McManus menyebutkan bahwa sistem digital hanya dapat berfungsi sebagai akselerator bila integrasi antar-aplikasi berjalan baik; jika tidak, digitalisasi justru menambah beban administratif dan memperlambat proses. (*McManus, 2023*)

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa terdapat asumsi-asumsi dalam perencanaan yang tidak berjalan sesuai dengan kenyataan. Penelitian ini berusaha menguraikan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program kerja DPU Bina Marga Tahun Anggaran 2024 dengan menggunakan pendekatan *Logical Framework Approach*. Pendekatan ini dipilih karena mampu memetakan hubungan antara input, aktivitas, dan output secara runtut, serta mendeteksi titik disrupsi akibat risiko eksternal. (*Harris & De Leeuw, 2023*) Fokus penelitian bukan pada pengukuran angka atau besaran pengaruh, melainkan pada penjelasan naratif mengenai bagaimana keterbatasan anggaran dan kendala sistem informasi mendistorsi pencapaian kinerja yang diharapkan.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terlihat adanya kesenjangan antara perencanaan teknokratis dengan realitas implementasi di lapangan. Keterbatasan kapasitas fiskal dan kendala sistem informasi digital menjadi faktor dominan yang menghambat pencapaian target kinerja Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024.

Untuk memahami secara lebih mendalam, penelitian ini merumuskan masalah pokok sebagai berikut:

1. Apa faktor penghambat pelaksanaan program kerja Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024?
2. Bagaimana analisis faktor penghambat pelaksanaan program kerja Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 berdasarkan pendekatan *Logical Framework Approach*?

C. KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan Logical Framework Approach sebagai kerangka analisis. LFA merupakan alat manajerial sekaligus analitis yang dirancang untuk membantu perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program secara sistematis. Inti dari LFA adalah logika vertikal yang menghubungkan *input* (sumber daya), *Activity* (kegiatan), *output* (hasil langsung), *outcome* (manfaat), dan *impact* (dampak luas). (The logical framework approach (LFA), 1999)

Dalam konteks penelitian ini, elemen yang paling relevan adalah kolom *Assumptions* (asumsi) dan *Risks* (risiko). LFA menekankan bahwa keberhasilan perpindahan dari satu level ke level berikutnya, misalnya dari aktivitas menuju output, sangat bergantung pada terpenuhinya asumsi eksternal. Jika asumsi tersebut, seperti ketersediaan dana tepat waktu atau sistem pendukung yang lancar, tidak terpenuhi maka akan muncul hambatan implementasi yang sering disebut sebagai *killer risks*. (Voss et al., 2025) Penelitian yang dilakukan McManus menunjukkan bahwa kegagalan integrasi sistem digital dapat menjadi risiko besar dalam pencapaian output program. (McManus, 2023) Dengan demikian, penelitian ini menggunakan LFA untuk menilai apakah prasyarat operasional berupa anggaran dan sistem informasi sudah cukup memadai dalam mendukung pencapaian target RENJA 2024.

D. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini dipilih karena mampu menggali pemahaman mendalam mengenai hambatan pelaksanaan program kerja Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Tujuannya adalah memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, bukan sekadar mengukur variabel, melainkan mendeskripsikan makna yang muncul dari interaksi sosial. (Sugiyono, 2008)

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci di Subbagian Keuangan dan Penyusunan Program serta perwakilan UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan (PJJ). Informan dipilih secara *purposive* karena memiliki pengetahuan langsung mengenai perencanaan dan pelaksanaan program kerja. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur agar peneliti dapat menangkap pengalaman dan pandangan informan secara lebih luas. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi, meliputi RENJA 2024, RENSTRA 2019-2024, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, serta regulasi terkait APBD Jawa Timur. Validitas data diperiksa melalui triangulasi sumber dan member check.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Tahap pertama adalah reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan. Tahap kedua adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dengan membandingkan temuan lapangan terhadap kerangka kerja LFA. Analisis ini tidak hanya mendeskripsikan hambatan, tetapi juga memetakan hubungan antara input, aktivitas, dan output sesuai logika vertikal

LFA sehingga dapat mengidentifikasi titik kegagalan asumsi yang menghambat pencapaian target RENJA 2024.

E. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data lapangan dan dokumen, pelaksanaan program kerja DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 menghadapi kendala struktural yang dapat dijelaskan melalui dua fokus pembahasan berikut:

1. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Kerja Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024

Pelaksanaan program kerja Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 tidak terlepas dari berbagai kendala yang muncul baik dari aspek fiskal maupun teknis. Meskipun dokumen perencanaan seperti RENJA telah menetapkan target yang jelas, realitas di lapangan menunjukkan adanya sejumlah hambatan yang memengaruhi pencapaian kinerja. Hambatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam dua persoalan utama, yaitu keterbatasan kapasitas anggaran dan masalah transformasi digital yang belum optimal.

a. Ketidakseimbangan Antara Kebutuhan Riil dan Ketersediaan Pagu Anggaran

Pelaksanaan program kerja Dinas PU Bina Marga Tahun Anggaran 2024 menghadapi kendala utama berupa ketidakseimbangan antara kebutuhan riil di lapangan dengan ketersediaan pagu anggaran. Dalam struktur anggaran 2024, prioritas diarahkan pada pemeliharaan rutin untuk menjaga kemantapan jalan provinsi dengan target 89,61 persen. (*Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur, 2024*) Namun, kondisi lapangan menunjukkan kerusakan jalan jauh lebih besar daripada kapasitas fiskal yang tersedia.

Dalam Rapat Pansus LKPJ, dilema muncul ketika DPU Bina Marga harus memilih antara mempertahankan kondisi jalan dengan penambalan lubang atau melakukan rekonstruksi total. (Pansus, *n.d.*) Sekitar 40 persen jalan provinsi yang sudah berusia tua sebenarnya membutuhkan rekonstruksi, tetapi anggaran yang tersedia hanya cukup untuk perbaikan sementara. Kasus Ruas Jalan Kasiyan-Puger menjadi contoh nyata: defisit fiskal daerah membuat proyek tersebut tidak bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran, sehingga realisasi fisik harus dilakukan secara bertahap (*phasing*) dan dilanjutkan ke APBD 2025 serta 2026.

Situasi ini diperburuk oleh faktor eksternal berupa tingginya volume kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) dari aktivitas industri semen yang mempercepat kerusakan jalan. Ketidakmampuan APBD untuk menanggung beban perbaikan secara penuh mendorong munculnya dinamika politis. Bupati Jember Hendy Siswanto secara terbuka menegur manajemen PT Imasco Asiatic dan mendesak pencairan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai bentuk kompensasi atas kerusakan infrastruktur. (*Wirawan, 2025*) Ketergantungan pada mekanisme negosiasi eksternal ini berdampak pada penataan prioritas, sehingga rehabilitasi infrastruktur lain seperti Jembatan Jetak harus menunggu giliran alokasi anggaran berikutnya.

Kendala semakin kompleks ketika terjadi bencana alam, seperti longsor di Pacet, Mojokerto. Penanganan darurat terkendala oleh prosedur pencairan dana tak terduga yang birokratis, sementara pos anggaran rutin sudah terkunci untuk kegiatan terjadwal. Akibatnya, dinas harus bergantung pada mekanisme perubahan anggaran (P-APBD) atau bantuan eksternal, yang membuat eksekusi fisik di lapangan tertunda.

b. Hambatan Transformasi Digital dan Inefisiensi Administratif

Selain masalah anggaran, hambatan lain muncul dari aspek teknis, khususnya sistem informasi. Berdasarkan wawancara dengan pejabat pelaksana teknis kegiatan

di UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan yang dilaksanakan pada 25 April 2025, penerapan E-Katalog Versi 6 dan aplikasi internal seperti SATA (Sistem Administrasi Tata Usaha) yang semula diharapkan meningkatkan transparansi justru menimbulkan kendala baru.

Di tingkat UPT, misalnya di Banyuwangi, proses adaptasi terhadap sistem E-Katalog sering memakan waktu lama karena antrean verifikasi akun penyedia dan ketidaksiapan rekanan lokal. Informan juga menjelaskan bahwa belum adanya integrasi antar aplikasi seperti SATA, SIM JALAN, SIPP, dan SITIA membuat pegawai harus melakukan input data berulang. Koordinasi antarunit pun masih sering dilakukan secara manual melalui pesan instan, sehingga sinkronisasi data realisasi fisik dan keuangan tidak berjalan optimal.

Audit BPK Perwakilan Jawa Timur mencatat perlunya percepatan transformasi digital yang lebih terintegrasi untuk mencegah SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang mengendap akibat keterlambatan administrasi penagihan proyek. Kondisi ini memperlihatkan bahwa sistem informasi yang ada belum sepenuhnya menjadi alat bantu, melainkan masih menjadi beban administratif bagi pelaksana teknis. (Jatim, 2024)

2. Analisis Faktor Penghambat Melalui Pendekatan *Logical Framework Approach*

Jika ditinjau dengan pendekatan *Logical Framework Approach*, hambatan-hambatan di atas menunjukkan kegagalan pada kolom Assumptions di level input menuju *Activity*. Dokumen RENJA disusun dengan asumsi bahwa anggaran akan tersedia cukup untuk kebutuhan rutin maupun insidental, serta sistem pendukung pengadaan berjalan lancar. Fakta di lapangan justru mematahkan asumsi tersebut. Keterbatasan anggaran (risiko pertama) dan gangguan sistem informasi (risiko kedua) menjadi faktor penghambat yang memutuskan rantai kinerja. Akibatnya, meskipun rencana kegiatan telah disusun dengan matang, output berupa jalan mantap dan jembatan standar tidak dapat terealisasi sepenuhnya sesuai jadwal. Dalam logika LFA, hal ini menunjukkan bahwa perencanaan yang ambisius tanpa kepastian dukungan sumber daya akan berujung pada deviasi hasil akhir.

Untuk membedah kegagalan pencapaian target secara struktural, penelitian ini memetakan temuan lapangan ke dalam matriks *Logical Framework*. Tabel berikut memperlihatkan bagaimana logika vertikal (*vertical logic*) program terputus oleh risiko eksternal yang tidak terantisipasi dalam dokumen perencanaan.

Tabel 1. Perbandingan Asumsi Perencanaan dan Fakta di Lapangan Berdasarkan Pendekatan LFA

Level Logika (Vertical Logic)	Target / Indikator Rencana	Asumsi Awal (Assumptions)	Temuan Risiko Fatal (Killer Risks)	Dampak pada Logika
INPUT (Sumber Daya)	<ul style="list-style-type: none"> - Pagu Anggaran APBD - Sistem Digital (SATA & E-Katalog) 	<ul style="list-style-type: none"> - Kapasitas fiskal cukup untuk preservasi rutin. - Sistem digital stabil dan terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Defisit preservasi (kurang Rp 103 M). - Kerusakan jalan akseleratif akibat ODOL. - Sistem disintegrated dan verifikasi lambat. 	Asumsi Gagal: <i>Input</i> tidak memadai untuk menopang Aktivitas.
ACTIVIY (Kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> - Preservasi Jalan/Jembatan - Administrasi dan Pengadaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses lelang dan eksekusi fisik tepat waktu (Triwulan I-II). 	<ul style="list-style-type: none"> - Phasing proyek (Kasus Kasiyan-Puger). - Ketergantungan pada dana CSR. - Inefisiensi <i>input</i> data manual. 	Hambatan Eksekusi: Kegiatan tertunda dan bergeser dari jadwal.
OUTPUT (Keluaran)	<ul style="list-style-type: none"> - Kemantapan Jalan (Target 89,61%) - Laporan Keuangan Tertib 	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Output</i> tercapai sesuai spesifikasi teknis dalam 1 tahun anggaran. 	<ul style="list-style-type: none"> - Risiko SILPA administrative. - Kualitas jalan menurun sebelum waktunya karena beban berlebih. 	Deviasi Target: Target kemantapan sulit dipertahankan secara optimal.

Sumber: Olahan Peneliti (2025)

Berdasarkan tabel di atas, analisis menggunakan *Logical Framework Approach* menunjukkan adanya disrupsi serius pada logika vertikal program. Sebagaimana dijelaskan dalam kerangka teori, keberhasilan transisi dari level input menuju *Activiy* sangat bergantung pada terpenuhinya asumsi dasar. Namun, penelitian ini menemukan bahwa asumsi yang dibangun dalam RENJA 2024 bersifat terlalu optimistis dan gagal memitigasi risiko eksternal (*killer risks*).

Pertama, pada dimensi input menuju *Activiy*, terjadi kegagalan asumsi kapasitas fiskal. Dokumen perencanaan disusun dengan asumsi kondisi normal, di mana laju kerusakan jalan bersifat konstan dan dapat ditangani dengan anggaran yang tersedia. Fakta di lapangan mematahkan logika ini. Kehadiran kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) bertindak sebagai variabel pengganggu yang mempercepat degradasi infrastruktur melebihi kemampuan perbaikan yang dianggarkan. Akibatnya, logika aktivitas bergeser drastis: dari yang seharusnya rekonstruksi tuntas menjadi penanganan bertahap (*phasing*) dan ketergantungan pada negosiasi dana CSR. Dalam perspektif LFA,

hal ini menunjukkan bahwa input yang direncanakan tidak lagi relevan untuk mendukung aktivitas yang dibutuhkan.

Kedua, pada dimensi *Activiy* menuju output, hambatan muncul dari asumsi kesiapan transformasi digital. Teori LFA menekankan bahwa aktivitas hanya akan menghasilkan output yang optimal jika didukung oleh prasyarat operasional yang lancar. Namun, temuan mengenai disintegrasi antara aplikasi SATA, SIM JALAN, dan E-Katalog justru menciptakan inefisiensi birokrasi. Sistem yang diasumsikan sebagai akselerator berubah menjadi hambatan teknis yang memperlambat verifikasi dan pengadaan. Risiko administratif ini berdampak langsung pada output, di mana realisasi fisik berpotensi terlambat dan menimbulkan SILPA, sebagaimana dicatat dalam audit BPK.

Secara keseluruhan, analisis LFA menunjukkan bahwa tidak tercapainya target kondisi jalan mantap secara optimal bukan disebabkan oleh lemahnya kompetensi teknis (*engineering failure*), melainkan oleh kegagalan asumsi perencanaan (*assumption failure*). Perencanaan yang disusun tidak memperhitungkan volatilitas beban jalan akibat ODOL dan kompleksitas adaptasi sistem digital sebagai risiko fatal, sehingga rantai kinerja terputus di tengah jalan.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan secara keseluruhan, kesimpulan penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

1. Faktor penghambat pelaksanaan program kerja Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 adalah: pertama, aspek fiskal yaitu terdapat ketidakseimbangan antara pagu anggaran APBD dengan kebutuhan riil preservasi jalan di lapangan. Kondisi ini diperburuk oleh kerusakan jalan yang bersifat akseleratif akibat beban kendaraan *Over Dimension Over Load* (ODOL) sehingga memaksa dinas melakukan pengerjaan secara bertahap (*phasing*). Kedua, aspek teknis administratif yang muncul dari transformasi digital yang belum matang. Disintegrasi antar sistem informasi seperti SATA, SIM JALAN, SIPP, dan SITIA menimbulkan inefisiensi verifikasi serta sumbatan administratif (*bottleneck*) yang berpotensi menimbulkan risiko SILPA.
2. Analisis dengan pendekatan *Logical Framework Approach* menunjukkan adanya disrupsi logika vertikal akibat kegagalan asumsi (*assumption failure*). Kegagalan ini teridentifikasi pada rantai *input* menuju aktivitas, di mana asumsi kapasitas fiskal runtuh karena tidak mampu memitigasi risiko eksternal kendaraan ODOL. Selain itu, kegagalan juga terjadi pada rantai aktivitas menuju *output*, di mana sistem digital yang diasumsikan sebagai akselerator justru menjadi beban administratif yang menghambat pemenuhan prasyarat operasional dan menyebabkan deviasi target kinerja.

DAFTAR PUSTAKA

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. (2021). *Rencana Strategis Perubahan 2019-2024 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur* [Rencana Strategis (Renstra)]. Pemerintah Provinsi Jawa Timur. https://binamarga.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/download/pdf-files/program/renstra/RENSTRA_2019-2024_final.pdf

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur. (2024). *Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Triwulan I 2024* [Laporan Survei Kepuasan Masyarakat]. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur.

https://binamarga.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/download/pdf-files/laporan/laporan_ikm/SKM_2024.pdf

- Harris, P., & De Leeuw, E. (2023). Infrastructure and health: Laying down the big connections for well-being. *Oxford Open Infrastructure and Health*, 1, ouac002. <https://doi.org/10.1093/ooih/ouac002>
- Jadidoleslami, S., & Azizi, M. (2022). An Overview of The Significance and Application of Constructability in Value Engineering. *CSID Journal of Infrastructure Development*, 5(1), 32-49. <https://doi.org/10.32783/csid-jid.v5i1.238>
- Jatim, A. W. B. (2024, May 4). *Penyerahan Serentak LHP atas LKPD Tahun 2023 Se-Jawa Timur | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur*. <https://jatim.bpk.go.id/berita-utama/penyerahan-serentak-lhp-atas-lkpd-tahun-2023-se-jawa-timur/>
- Ma'rifah, A. (2022). The Effect of Infrastructure Development on Economic Growth. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 5(3), 230-241. <https://doi.org/10.15294/efficient.v5i3.54394>
- McManus, P. (2023). Infrastructure, health and urban planning: Rethinking the past and exploring future possibilities as a response to Harris & De Leeuw (2022). *Oxford Open Infrastructure and Health*, 1, ouac001. <https://doi.org/10.1093/ooih/ouac001>
- Pansus: LKPj Gubernur Jatim 2023 Layak Dilanjutkan Pembahasannya*. (n.d.). Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Retrieved December 20, 2025, from <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pansus-lkpj-gubernur-jatim-2023-layak-dilanjutkan-pembahasannya>
- Pj Gubernur Jatim Sampaikan Nota Keuangan Perubahan KUA PPAS APBD 2024*. (n.d.). Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Retrieved December 20, 2025, from <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/pj-gubernur-jatim-sampaikan-nota-keuangan-perubahan-kua-ppas-apbd-2024>
- Salim, W., & Faoziyah, U. (2022). The Effect of Transport Infrastructure on Land-use Change: The Case of Toll Road and High-Speed Railway Development in West Java. *Journal of Regional and City Planning*, 33(1), 53-70. <https://doi.org/10.5614/jpwk.2022.33.1.3>
- Sugiyono. (2008). *Metode penelitian pendidikan: (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* (Cet. 6). Alfabeta.
- The logical framework approach (LFA): Handbook for objectives-oriented planning* (4. ed). (1999). NORAD.
- Voss, S., Bauer, J., Coenen, M., Jung-Sievers, C., Moore, G., & Rehfuess, E. (2025). Logic models for the evaluation of complex interventions in public health: Lessons learnt from a staged development process. *BMC Public Health*, 25(1), 1923. <https://doi.org/10.1186/s12889-025-23171-8>
- Wirawan, O. A. (2025, January 14). *Bupati Jember Hendy Siswanto Tegur Perwakilan PT Imasco Asiatic*. <https://beritajatim.com/bupati-jember-hendy-siswanto-tegur-perwakilan-pt-imasco-asiatic>